

Reposisi Peran & Strategi KPK GNPSDA: Relasi Kuasa Politik & Reaktualisasi Kolaborasi Gerakan Sosial

Asfinawati, YLBHI

KORUPSI DEFFINISI KORUPSI?

KORUPSI PENEGAKAN HUKUM
KORUPSI?

Bukan Korupsi?

1. Tumpang tindih dengan lahan milik/kelola masyarakat
2. Tumpang tindih izin karena izin diterbitkan pada wilayah yang bukan kewenangannya (misal Bupati A menerbitkan izin di Kabupaten B)
3. Izin dalam kawasan hutan tanpa pinjam pakai kawasan
4. Pembangkangan hukum untuk mendukung korporasi
 - a. Penolakan membuka data HGU meski sudah ada putusan MA
 - b. Mengeluarkan izin lingkungan baru secara kilat di atas izin yang sudah dibatalkan MA (Kasus Kendeng, PLTU Cirebon)

(Data Manajemen Pengetahuan YLBHI)

Bukan Korupsi?

5. Putusan MK diabaikan untuk menyelesaikan konflik (mis. Putusan MK 35/2012, 45/2011, 95/2014)
6. Peraturan Kapolri No. 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu sebagaimana diubah dengan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2019.
 - Perkap ini mengakomodasi kerjasama pihak ketiga untuk pengamanan objek vital dan objek tertentu.
 - Peraturan ini mengganggu independensi penegak hukum dan dapat dilihat sebagai legalisasi perilaku korup.

(Data Manajemen Pengetahuan YLBHI)

Bukan Korupsi?

7. Polisi meminta orang yang dikriminalisasi karena melawan perusahaan memutus kuasa
8. Penuntut umum meminta orang yang dikriminalisasi karena melawan perusahaan memutus kuasa
9. Kejaksaan menuntut mereka yang tidak mau memutus kuasa dengan tuntutan yang lebih berat (kasus WKS Jambi)
10. Pengadilan: PTUN menolak gugatan terkait pembatalan HGU

Bukan Korupsi?

11. Standar ganda laporan kasus² SDA: masyarakat melapor ke polisi tapi polisi tidak merespon. Ketika perusahaan yang melapor, segera diproses (kasus Kendeng, kasus WKS Jambi, kasus PTPN IX)
12. Standar ganda status SDA: masyarakat melaporkan korporasi atau pelaku aktivitas illegal (c: illegal mining & illegal logging) dalam kawasan hutan, mereka akan mengatakan terkendala karena status hutan belum dikukuhkan, korporasi mengajukan izin status itu tidak dilihat sebagai sebuah persoalan

(Data Manajemen Pengetahuan YLBHI)

Bukan Korupsi?

12. Penegakan Hukum seolah-olah: penetapan tersangka dari individu, bukan perusahaan untuk kasus² kebakaran hutan di Riau, cara rutin penegak hukum untuk memberi jawaban ke masyarakat seolah-olah penegakan hukum telah berjalan dengan efektif.

(Data Manajemen Pengetahuan YLBHI)

No	Tahun	Perorangan	Korporasi
1	2013	14	0
2	2014	109	1
3	2015	53	18
4	2016	79	2
5	2017	10	0
6	2018	35	0
7	2019	26	1
Jumlah		326	22

Data: intisari dari berbagai sumber

Bukan Korupsi?

13. Pemerintah membuat RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memiliki masalah mendasar, a.l:

- Melawan banyak putusan MK
- Draft RUU disembunyikan saat pembahasan di pemerintah
- Hanya melibatkan organisasi pengusaha tapi tidak melibatkan masyarakat terdampak seperti buruh, nelayan dll
- Berpotensi merampas hak milik masyarakat

Kesimpulan

- GNPSDA KPK sangat strategis: kasus-kasus kriminalisasi rakyat, perampasan lahan masyarakat, kerusakan lingkungan (alih fungsi hutan, izin tambang) banyak terjadi dengan sokongan korupsi
- Penegakan hukum korupsi akan berdampak pada pemenuhan hak rakyat & kelestarian ekologis
- Ada limitasi dalam penegakan hukum:
 1. Keterbatasan definisi hukum positif
 2. Keterbatasan menafsirkan hukum positif

Kesimpulan

- Ada limitasi dalam penegakan hukum
 3. Korupsi dalam penegakan hukum sehingga penegakan hukum tidak berjalan atau ditegakkan dengan tidak imbang, atau tidak menyeluruh
 4. Supervisi dan penyidikan KPK minim:
 - i. tidak ada kasus baru,
 - ii. tersangka buron: sejak Jan 2020 ada 5 orang buron
 - iii. tidak terdengar dan terasa adanya supervisi

Terobosan Kolaborasi sebagai Gerakan

1. Dilibatkannya korban korupsi
 - A. Supervisi melalui gelar perkara antara penegak hukum, KPK dengan mendatangkan korban sebagai penambah informasi, data dan bukti
 - B. Mekanisme pemulihan masyarakat korban (sesuai kondisi yang dialami) yang terdampak korupsi. Setidaknya 24 hakim ditangkap KPK dari hingga 2018 (<https://news.detik.com/berita/d-4322524/deretan-hakim-yang-kena-ott-kpk>). Pertanyaannya bagaimana dengan putusan hakim yang terbukti buat atas korupsi tersebut?

Terobosan Kolaborasi sebagai Gerakan

- **Pasal 34 Akibat tindakan korupsi:** dengan memperhatikan hak-hak pihak ketiga yang diperoleh dengan itikat baik, Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk mengatasi akibat-akibat korupsi. Dalam kaitan ini, Negara Pihak dapat mempertimbangkan korupsi sebagai
- faktor yang relevan dalam proses hukum untuk membatalkan atau meniadakan kontrak, mencabut konsesi atau instrumen lain yang sama atau mengambil tindakan pemulihan lain.

Kasus Korupsi hakim PHI, Imas.

- Imas hakim PHI dalam perkara PT. Onamba yang mem PHK buruh sebagai bentuk pemberangusan serikat pekerja.
- Imas menerima uang Rp 352 juta dari Odi yang menjadi perwakilan PT OI untuk memenangkan kasus mereka. Putusan sidang pada April 2011 mengabulkan semua gugatan PT OI.
- Imas ditangkap penyidik KPK tanggal 30 Juni 2011 di RM Ponyo, Cinunuk, Kabupaten Bandung. Uang suap yang diterima terdakwa dimasukkan ke dalam katong pelastik warna hitam.
- Buruh tetap di PHK

- Kasus Korupsi PT. Duta Palma Group tahun 2014, dalam perkara suap terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau. Apa dampaknya hal ini kepada kebakaran lahan & masalah asap yang mengganggu masyarakat?
- Kasus Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi, izin usaha pertambangan (IUP) tidak sesuai prosedur bagi tiga perusahaan. Jika sudah beroperasi biasanya tambang menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan tak jarang mengambil lahan warga. Apa dampak kasus ini kepada warga terdampak?

Kasus PLTU Mulut Tambang Riau I

- Kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.
- Masyarakat menolak pembangunan PLTU ini dengan banyak argumentasi. Tetapi setelah kasus korupsi pembangunan hanya ditunda bukan dihentikan.

Terobosan Kolaborasi sebagai Gerakan

2. Pengembalian hasil korupsi bukan hanya ke negara tetapi kepada korban. Bagaimana dengan korupsi ijin tambang, hutan, dll, apakah masyarakat mendapat manfaat langsung dari putusan korupsi tersebut?

Pasal 35 UNCAC tentang Kompensasi kerugian: Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, untuk menjamin agar badan atau orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan korupsi mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kerugian itu untuk memperoleh kompensasi.

Terobosan Kolaborasi sebagai Gerakan

3. Dalam rangka pencegahan mendorong adanya kebijakan & sistem “peningkatan transparansi dan mendorong kontribusi publik pada proses pengambilan keputusan” dalam perijinan SDA, bersama-sama dengan masyarakat. (Lihat pasal 13 UNCAC)
4. Dalam rangka pencegahan mendorong Kementrian dan Lembaga terkait sektor SDA memiliki kebijakan & sistem “mengusahakan agar publik memiliki akses yang efektif pada informasi”, bersama-sama dengan masyarakat. (Lihat pasal 13 UNCAC)

Terobosan Kolaborasi sebagai Gerakan

5. Mendorong (bersama-sama masyarakat) agar K/L terkait SDA memiliki kebijakan dan sistem yang menyediakan informasi tentang potensi korupsi di instansinya, upaya menutup potensi tersebut dan jumlah orang yang tersangkut korupsi. (Lihat pasal 13 UNCAC)
6. Mendorong adanya peraturan perundang-undangan & kebijakan yang melindungi kebebasan untuk mencari, menerima, mempublikasikan dan menyebarkan informasi tentang korupsi di K/L terkait SDA juga ditubuh penegak hukum. (Lihat pasal 13 UNCAC)